BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda

kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok Non-Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata

kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi
    a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
    b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
    a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
    b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
    c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
    d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan kepegawaian,
    b. Melakukan urusan Keuangan,
    c. Melakukan urusan tata usaha,
    d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
    b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
    c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
    d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
    b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
    c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penetapan,
    b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
    b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
   b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
   c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
   d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
   b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
   c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
   d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 40 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu petugas seksi ekstensifikasi. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	28	70%
Perempuan	12	30%
Jumlah	40	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang atau sebesar 70% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang atau sebesar 30%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan bahwa pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi lebih membutuhkan tenaga Laki-laki lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya melakukan perekam data, pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi perpajakan.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	6	15.00%
26-30 Tahun	11	27.50%
31-35 Tahun	3	7.50%
36-40 Tahun	6	15.00%
>40 Tahun	14	35.00%
Jumlah	40	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20 sampai 25 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 15%, 26 sampai 30 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 27,5%, 31 sampai 35 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 7,5%, 36 sampai 40 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 15% dan usia lebih dari 40 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia lebih dari 40 tahun. Hal ini disebabkan bahwa pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi lebih membutuhkan tenaga yang lebih berpengalaman lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya dan menghindari dari kesalahan dalam melakukan perekam data, pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi perpajakan.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	10	25.00%
Diploma I,II	2	5.00%
Diploma III	11	27.50%
Strata I (S1)	13	32.50%
Strata II (S2)	3	7.50%
Lain-lain	1	2.50%
Jumlah	40	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 10 orang atau sebesar 25%, Diploma I,II sebanyak 2 orang atau sebesar 5%, Diploma III (D3) sebanyak 11 orang

atau sebesar 27,5% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini disebabkan bahwa pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi lebih membutuhkan tenaga professional yang berpendidikan Strata I (SI) lebih banyak, hal ini dikarenakan perekam data, pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi perpajakan membutuhkan proses analisis lebih lanjut yang rumit. Sehingga jenjang Strata I lebih banyak ditempatkan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
0 s/d 1 Tahun	1	2.50%
1– 3 Tahun	2	5.00%
3 – 5 Tahun	5	12.50%
>5 Tahun	32	80.00%
Jumlah	40	100%

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 2,5%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 5%, responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 12,5%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 32 orang atau sebesar 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini disebabkan bahwa

pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi membutuhkan tenaga professional yang berpengalaman lebih dari 5 tahun lebih banyak, ini dikarenakan perekam data, pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi perpajakan membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, sehingga pegawai yang telah bekerja lebih dari 5 tahun lebih banyak ditempatkan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Metode Deskriptif

4.2.1.1 Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 40 orang petugas seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP di wilayah Kota Bandung atas kualitas data. Untuk mendapatkan gambaran kualitas data di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kesepuluh indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Data

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Akurat	131	200	65.50%	Cukup
2.	Dapat mensupport sistem	147	200	73.50%	Baik
3.	Mengekspresikan kebijakan manajemen	143	200	71.50%	Baik
4.	Simple	150	200	75.00%	Baik
5.	Sah	149	200	74.50%	Baik
6	Valid	131	200	65.50%	Cukup
7	Tepat waktu	119	200	59.50%	Cukup
8	Lengkap	127	200	63.50%	Cukup
9	Dapat dipercaya	144	200	72.00%	Baik
10	Kemudahan akses	301	400	75.25%	Baik
	Total	1542	2200	70.09%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai kualitas data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total adalah 1542. Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung baik. Hal ini di sebabkan bahwa data yang ada dalam KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung telah baik dalam mensuport sistem yang ada (SIDJP), dengan baik mengekspresikan kebijakan manajemen yang ada (kaitannya dalam kebijakan DJP), Simple, Sah (sesuai dengan prosesedur perpajakan yang ada), dapat dipercaya, dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Namun jika dilihat dari keakuratan, kevalidan, ketepatan waktu, dan kelengkapan data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya cukup memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kualitas data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Akurat

Indikator akurat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keakuratan Data

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
1	Tingkat akurasi data wajib pajak	0	15	21	4	0	40	131	200
		0%	37.5%	52.5%	10.0%	0.0%	100.0%	65.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{131}{1x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{131}{200} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 65.50%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori cukup. Apabila dilihat, tanggapan mayoritas responden atau sebanyak 52.5% berpendapat bahwa data yang diterima cukup akurat dengan kisaran tingkat akurasi 41-61%, 10% responden berpendapat tingkat akurasi data wajib pajak sebesar 21-40% dan reponden sebanyak 37.5% berpendapat bahwa tingkat akurasi data wajib pajak sebesar 61-80%. Ini membuktikan bahwa KPP Pratama di wilyah kota Bandung masih kesulitan mendapat data wajib pajak yang akurat. Hal ini bisa disebabkan karena wajib pajak yang melaporkan data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

2. Dapat mensuport sistem

Indikator dapat mensupport sistem diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Data yang Mensuport Sistem

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
2	Kondisi data (SPT)	8	13	17	2	0	40	147	200
		20.0%	32.5%	42.5%	5.0%	0.0%	100.0%	73.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{147}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{147}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 73.50%, bila merujuk pada tabel 4.7 termasuk dalam kategori baik. Bila dilihat lebih lanjut diperoleh ukuran mengenai data yang mensupport sistem, dimana mayoritas atau sebanyak 42.5% responden berpendapat bahwa kondisi data (SPT) yang diinput kedalam SIDJP cukup mensuport sistem, 32.5% responden berpendapat bahwa kondisi data (SPT) yang diinput kedalam SIDJP mensuport sistem, 20% responden berpendapat bahwa kondisi data (SPT) yang diinput kedalam SIDJP sangat mensuport sistem dan sisanya 5% responden berpendapat bahwa kondisi data (SPT) yang diinput kedalam SIDJP kurang mensuport sistem.

3. Mengekspresikan kebijakan manajemen

Indikator mengekspresikan kebijakan manajemen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Data yang Mengekspresikan Kebijakan Manajemen

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
3	Data SSP	8	13	15	2	2	40	143	200
		20.0%	32.5%	37.5%	5.0%	5.0%	100.0%	71.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{143}{1x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{143}{200} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 71.50%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori baik. Bila dilihat lebih lanjut diperoleh ukuran mengenai data yang mengekspresikan kebijakan manajemen, dimana mayoritas atau sebanyak 37.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP berupa data SPT dan SSP merupakan data yang cukup mengekspresikan kebijakan manajemen, 32.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP berupa data SPT dan SSP merupakan data yang mengekspresikan kebijakan manajemen, 20% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP berupa data SPT dan SSP merupakan data yang sangat mengekspresikan kebijakan manajemen, 5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP berupa data SPT dan SSP merupakan data

yang kurang mengekspresikan kebijakan manajemen dan sisanya 5% responden berpendapat responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP berupa data SPT dan SSP merupakan data yang tidak mengekspresikan kebijakan manajemen atau bisa dikatakan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Simple

Indikator simple diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Simple

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
4	Data (SPT dan SSP) yang diterima	10	11	18	1	0	40	150	200
		25.0%	27.5%	45.0%	2.5%	0.0%	100.0%	75.0%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{150}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{150}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 75%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori baik. Bila dilihat lebih

lanjut diperoleh ukuran mengenai data yang simple, dimana mayoritas atau sebanyak 45% responden berpendapat bahwa Data (SPT dan SSP) yang diterima cukup simple dan mudah dipahami, 27.5% responden berpendapat bahwa Data (SPT dan SSP) yang diterima simple dan mudah dipahami, 25% responden berpendapat bahwa Data (SPT dan SSP) yang diterima sangat simple dan mudah dipahami dan sisanya 2.5% responden berpendapat bahwa Data (SPT dan SSP) yang diterima kurang simple dan sulit dipahami.

5. Sah

Indikator sah diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sah

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
5	Keabsahan data yang diinput kedalam SIDJP	7	16	16	1	0	40	149	200
		17.5%	40.0%	40.0%	2.5%	0.0%	100.0%	74.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{149}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{149}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 74.5%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori baik. Bila

dilihat lebih lanjut diperoleh ukuran mengenai keabsahan data, dimana mayoritas atau sebanyak 40% responden berpendapat bahwa keabsahan data yang diinput kedalam SIDJP cukup sesuai prosedur, 40% responden berpendapat bahwa keabsahan data yang diinput kedalam SIDJP sesuai dan benar secara prosedur, 17.5% responden berpendapat bahwa keabsahan data yang diinput kedalam SIDJP sangat sesuai dan benar secara prosedur dan sisanya 2.5% responden berpendapat bahwa keabsahan data yang diinput kedalam SIDJP kurang sesuai prosedur.

6. Valid

Indikator valid diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Valid

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
6	Validitas data (SPT dan SSP)	1	13	22	4	0	40	131	200
		2.5%	32.5%	55.0%	10.0%	0.0%	100.0%	65.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{131}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{131}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 65.50%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori cukup. Dimana mayoritas atau sebanyak 55% responden berpendapat bahwa validitas data (SPT dan SSP) yang diinput kedalam SIDJP cukup sesuai dengan keadaan sebenarnya pajak terutang, 32.5% berpendapat bahwa validitas data (SPT dan SSP) yang diinput kedalam SIDJP sesuai dengan keadaan sebenarnya pajak terutang, 2.5% berpendapat bahwa validitas data (SPT dan SSP) yang diinput kedalam SIDJP sangat sesuai dengan keadaan sebenarnya pajak terutang dan sisanya 10% berpendapat bahwa validitas data (SPT dan SSP) yang diinput kedalam SIDJP kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya pajak terutang. Hal ini membuktikan bahwa masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan pengisian dan pelaporan SPT ataupun bisa jadi kesalahan pengisisan oleh wajib pajak/ adanya wajib pajak yang salah hitung dalam pengisian SPT yang membuat SPT tidak valid.

7. Tepat waktu

Indikator tepat waktu diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tepat Waktu

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
7	Data yang diinput kedalam SIDJP	0	8	23	9	0	40	119	200
		0.0%	20.0%	57.5%	22.5%	0.0%	100.0%	59.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{119}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{119}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 59.5%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori cukup. Bila dilihat lebih lanjut diperoleh ukuran mengenai ketepatan waktu perekaman data, dimana mayoritas atau sebanyak 57.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP cukup tepat waktu, 20% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP tepat waktu dan sisanya 22.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP kurang tepat waktu, jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa proses penginputan data masih bermasalah. Hal ini membuktikan bahwa perekaman SPT selama ini membutuhkan waktu yang lama karena jumlah SPT yang banyak dan ditambah lagi oleh sumber daya manusia yang ditugaskan menginput/merekam SPT yang hanya sedikit.

8. Lengkap

Indikator kelengkapan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Lengkap

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
8	Kelengkapan data yang diinput ke dalam SIDJP	0	13	21	6	0	40	127	200
		0%	32.5%	52.5%	15.0%	0.0%	100.0%	63.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 63.5%, atau dapat dikatakan termasuk dalam kategori cukup. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut berpendapat bahwa tingkat kelengkapan data yang diinput ke dalam SIDJP telah memenuhi kriteria yang cukup. Tanggapan mayoritas responden (52,5%) menjawab kelengkapan data yang dinput ke dalam SIDJP sebesar 41-61% dan (15%) responden yang menjawab kelengkapan data yang diinput kedalam SIDJP sebesar 21-41%, sedangkan sisanya (32.5%) berpendapat kelengkapan data yang diinput ke dalam SIDJP 61-80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang kurang lengkap dalam menyampaikan data perpajakannya seperti kurang melengkapi lampiran SPT, kelengkapan identitas dan lainnya.

9. Dapat dipercaya

Indikator dapat dipercaya diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dipercaya

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
9	Data (SPT dan SSP) yang diinput ke dalam SIDJP	6	13	20	1	0	40	144	200
		15.0%	32.5%	50.0%	2.5%	0.0%	100.0%	72.0%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{144}{1x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{144}{200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72.00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 72%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori cukup. Bila dilihat lebih lanjut diperoleh ukuran mengenai kepercayaan data yang diinput ke dalam SIDJP, dimana mayoritas atau sebanyak 50% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP cukup dapat dipercaya, 32.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP dapat dipercaya, 15% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP sangat dapat dipercaya dan sisanya 2.5% responden berpendapat bahwa data yang diinput kedalam SIDJP kurang dapat dipercaya.

10. Kemudahan akses

Indikator kemudahan akses diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dipercaya

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
10	Data yang diinput ke dalam SIDJP	6	11	21	2	0	40	141	200
		15.0%	27.5%	52.5%	5.0%	0.0%	100.0%	70.5%	
11	Kerahasiaan Data yang diinput kedalam SIDJP	12	16	12	0	0	40	160	200
		30.0%	40.0%	30.0%	0.0%	0.0%	100.0%	80.0%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{301}{2x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{301}{400} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.25\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 75.25%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut berpendapat bahwa kemudahan akses data dalam proses input data sebesar 70.5%. Jawaban responden mayoritas responden atau sebanyak 52.5% berpendapat data yang diinput kedalam SIDJP cukup mudah diakses, 27.5% berpendapat data yang diinput kedalam SIDJP mudah diakses, 15% berpendapat data yang diinput kedalam SIDJP sangat mudah diakses dan sisanya 5% berpendapat data yang diinput kedalam SIDJP sulit diakses.

Tanggapan mengenai kerahasiaan data yang telah diinput kedalam SIDJP responden memberi tanggapan bahwa data yang diinput kerahasiaan dapat terjaga kerahasiaannya. Dalam hal ini dibuktikan skor tanggapan responden sebesar 80%. Jawaban mayoritas responden atau sebanyak 40% menjawab bahwa data yang diinput kedalam SIDJP telah terjaga kerahasiaannya, yang menjawab sangat terjaga kerahasiaannya atau sebanyak 30% dan yang menjawab cukup terjaga kerahasiaannya sebanyak 30%. Bila dilihat secara umum kerahasiaan data yang telah diinput kedalam SIDJP dapat dikatakan baik, ini dikarenakan hanya petugas pajak tertentu yang dapat melihat data dari wajib pajak selain itu pegawai yang diberikan tugas menginput mempunyai *password* masing-masing yang dipakai dipakai untuk membuka SIDJP.

4.2.1.2 Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 40 orang petugas seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung mengenai variabel Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System***.** Untuk mendapatkan gambaran Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan

rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kesepuluh indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	***Hardware***	654	800	81.75%	**Baik**
2	***Software***	305	400	76.25%	**Baik**
3	***Brainware***	151	200	75.50%	**Baik**
4	**Prosedur**	295	400	73.75%	**Baik**
5	**Jaringan Komunikasi**	629	1000	62.90%	**Cukup**
6	***Database***	452	600	75.33%	**Baik**
7	***Data Warehouse***	269	400	67.25%	**Cukup**
8	***Data Mining***	394	600	65.67%	**Cukup**
9	**OLAP (*Online Analytical Processing*)**	345	600	57.50%	**Cukup**
10	**Manfaat *Business Intelligence Sytem***	306	400	76.50%	**Baik**
	Total	**3800**	**5400**	**70.37%**	**Baik**

Perhitungan= Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total implementasi SIDJP adalah 3800.

Ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena *hardware* yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung memiliki kualitas peralatan (*input*, proses, *output*) yang berkualitas sehingga dapat menunjang pekerjaan dalam hal penggunaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Software yang ada dapat menunjang kegiatan

yang ada dalam SIDJP dikarenakan sistem operasi SIDJP telah *Multi tasking, multi user,* dan *interpreter* yang u*ser friendly*, Para pengguna pun dapat memahami dan mengerti dalam memproses SIDJP ditambah lagi prosedur yang ada dapat membantu dalam aktifitas yang dilakukan dalam penggunaaan sistem informasi. Dengan adanya SIDJP dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada, terutama informasi di bidang perpajakan. Selain itu SIDJP juga meningkatkan investasi teknologi yang ada di bidang perpajakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak baik. Namun jika dilihat dari jaringan komunikasi, *data warehouse*, *data mining* dan *OLAP* (*Online Analytical Processing*) belum dapat dikatakan baik.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Hardware

Indikator *hardware* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai *Hardware*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
12	Peralatan input *hardware (keyboard, mouse,scanner)* yang digunakan	4	20	15	1	0	40	147	200
		10.0%	50.0%	37.5%	2.5%	0.0%	100.0%	73.5%	
13	Jenis *processor* yang digunakan	19	12	9	0	0	40	170	200
		47.5%	30.0%	22.5%	0.0%	0.0%	100.0%	85.0%	
14	Kapasitas memori (RAM) yang digunakan	24	16	0	0	0	40	184	200
		60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	92.0%	
15	Peralatan output *hardware* (printer dan layar monitor) yang digunakan	4	25	11	0	0	40	153	200
		10.0%	62.5%	27.5%	0.0%	0.0%	100.0%	76.5%	

Total Skor	654
Persentase Skor	81.75%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{654}{4x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{654}{800} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81.75\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai *hardware* sebesar 81.75% yang termasuk dalam kategori baik. Skor total tersebut didapat mengenai pertanyaan tentang peralatan input, proses dan output *hardware* yang digunakan. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai kualitas peralatan input hardware (*keyboard, mouse, scanner*) yang digunakan, dimana mayoritas atau sebanyak 50% responden berpendapat bahwa peralatan input (*keyboard, mouse, scanner*) yang digunakan berkualitas, 37.5% responden berpendapat bahwa peralatan input (*keyboard, mouse, scanner*) yang digunakan cukup berkualitas, 10% responden berpendapat bahwa peralatan input (*keyboard, mouse, scanner*) yang digunakan sangat berkualitas dan sisanya 2,50% responden berpendapat bahwa peralatan input (*keyboard, mouse, scanner*) yang digunakan kurang berkualitas.

Dalam tanggapan responden mengenai peralatan *hardware* yang berfungsi sebagai pemrosesan (*prossesor*) mayoritas responden atau sebanyak 47.5% menjawab *Core 2 Duo*, 30% responden menjawab *Dual Core* dan sisanya 22.5% responden menjawab Pentium 4. Hal ini menunjukkan bahwa *processor* yang digunakan pada umumnya berkualitas dan menunjang proses penerapan sistem informasi.

Mengenai perangkat memori (RAM) yang digunakan menunjukkan jawaban mayoritas responden atau sebanyak 60% menjawab bahwa RAM yang digunakan mempunyai kapasitas diatas 512 Mb sedangkan sisanya atau sebanyak 40% responden menjawab bahwa kapasitas RAM yang berada di komputer mereka berkapasitas 512 Mb. Hal ini memperjelas bahwa *hardware* yang digunakan telah berkualitas.

Pembahasan terakhir tentang *hardware* ialah mengenai pealatan outputnya, mayoritas jawaban responden atau sebanyak 62.5% menjawab bahwa peralatan output semisal layar monitor dan *printer* yang digunakan telah berkualitas, 10% berpendapat bahwa peralatan output sangat berkualitas dan sisanya 27.5% berpendapat peralatan output cukup berkualitas. Apabila dilihat secara menyeluruh, perangkat *hardware* yang ada di kantor pelayanan pajak diwilayah kota bandung sudah baik. Hal ini dikarenakan pada waktu yang lalu modernisasi perpajakan mulai dibenahi teutama modernisasi dibidang teknologi informasi.

2. Software

Indikator *software* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Distribusi Jawaban Responden Mengenai *Software*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
16	Sistem operasi yang digunakan	2	5	33	0	0	40	129	200
		5.0%	12.5%	82.5%	0.0%	0.0%	100.0%	64.5%	
17	Sistem operasi yang digunakan dalam SIDJP	26	4	10	0	0	40	176	200
		65.0%	10.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%	88.0%	
Total Skor								305	
Persentase Skor								76.25%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{305}{2x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{305}{400} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76.25\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 76.25%, yang masuk dalam kategori baik. Sistem operasi yang digunakan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung umumnya cukup baik, dikarenakan mayoritas responden atau sebanyak 82.5% menggunakan sistem operasi *windows XP* dalam unit komputernya. Sedangkan responden yang menggunakan *windows vista* sebesar 12.5% dan sisanya menggunakan sistem operasi *windows 7* sebanyak 5%.

Sedangkan Sistem aplikasi SIDJP umumnya sangat baik, karena mayoritas jawaban reponden atau sebanyak 65% berpendapat bahwa sistem operasi SIDJP telah *Multi tasking, multi user, dan interpreter* yang sangat u*ser friendly*, 10% berpendapat bahwa sistem operasi dalam SIDJP *multi user dan multi tasking* dan sisanya 25% berpendapat bahwa sistem operasi dalam SIDJP telah *Multi tasking, multi user, dan interpreter* yang kurang *user friendly.*

3. Brainware

Indikator *brainware* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Mengenai *Brainware*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
18	SIDJP dalam implementasinya	10	11	19	0	0	40	151	200
		25.0%	27.5%	47.5%	0.0%	0.0%	100.0%	75.5%	
Total Skor								151	
Persentase Skor								75.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{151}{1x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{151}{200} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 75.50% atau dalam kategori baik. Pertanyaan mengenai *brainware* berupa tanggapan SIDJP dalam implementasinya bagi user, mayoritas responden atau sebanyak 47,5% bependapat bahwa SIDJP dalam implementasinya cukup mengerti dan cukup paham, 27.5% berpendapat bahwa SIDJP dalam implementasinya bagi user mengerti dan paham dan sisanya 25% berpendapat bahwa implementasi SIDJP sangat mengerti dan sangat paham. Jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIDJP secara umum dapat dimengerti dan dipahami oleh para pengguna.

4. Prosedur

Indikator prosedur diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prosedur

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
19	Prosedur dalam SOP SIDJP	9	12	18	1	0	40	149	200
		22.5%	30.0%	45.0%	2.5%	0.0%	100.0%	74.5%	
20	Aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIDJP sudah sesuai dengan SOP	3	20	17	0	0	40	146	200
		7.5%	50.0%	42.5%	0.0%	0.0%	100.0%	73.0%	
Total Skor								295	
Persentase Skor								73.75%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.20 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{295}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{295}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73.75\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 73.75% yang merupakan kategori baik. Dalam penilaian prosedur dalam SOP SIDJP menurut mayoritas reponden atau sebanyak 45% berpendapat bahwa Prosedur dalam SOP SIDJP cukup membantu menjalankan sistem informasi, 30% berpendapat bahwa Prosedur dalam SOP SIDJP membantu menjalankan sistem informasi, 22.5% berpendapat bahwa Prosedur dalam SOP SIDJP sangat membantu menjalankan sistem informasi, dan sisanya 2.5% berpendapat bahwa Prosedur dalam SOP SIDJP kurang membantu menjalankan sistem informasi.

Untuk kesesuaian aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIDJP dengan SOP yang ada, mayoritas responden atau sebanyak 50% beranggapan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan SOP yang tersedia, 7.5% berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIDJP sangat sesuai dengan SOP yang tersedia dan sisanya 42.5% berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIDJP cukup sesuai dengan SOP yang tersedia.

5. Jaringan Komunikasi

Indikator jaringan komunikasi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jaringan Komunikasi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
21	Komunikasi seperti LAN, wireless, dll yang digunakan	3	17	19	1	0	40	142	200
		7.5%	42.5%	47.5%	2.5%	0.0%	100.0%	71.0%	
22	Mengakses SIDJP	3	16	15	6	0	40	136	200
		7.5%	40.0%	37.5%	15.0%	0.0%	100.0%	68.0%	
23	Kecepatan akses data/informasi melalui SIDJP	0	12	18	9	1	40	121	200
		0.0%	30.0%	45.0%	22.5%	2.5%	100.0%	60.5%	
24	SIDJP terintegrasi seluruh Indonesia	0	10	28	2	0	40	128	200
		0.0%	25.0%	70.0%	5.0%	0.0%	100.0%	64.0%	
25	SIDJP terhubung secara online dengan pihak ketiga (bank) dan tidak ada masalah dalam jaringannya	0	7	14	13	6	40	102	200
		0.0%	17.5%	35.0%	32.5%	15.0%	100.0%	51.0%	
Total Skor								629	
Persentase Skor								62.9%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.21 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{629}{5x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{629}{1000} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62.90\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 62.90% atau masuk dalam kategori cukup. Indikator Jaringan komunikasi dibagi menjadi lima butir pertanyaan yaitu mengenai peralatan komunikasi yang digunakan,

tempat mengakses SIDJP, kecepatan mengakses SIDJP, integrasi SIDJP ke seluruh Indonesia dan jaringan komunikasi dengan pihak ketiga (Bank). Bila dilihat dari butir pertanyaan mengenai peralatan komunikasi yang digunakan mayoritas responden atau sebanyak 47.5% berpendapat bahwa alat komunikasi seperti *LAN, wireless*, dll yang digunakan cukup berkualitas, 42.5% berpendapat bahwa komunikasi seperti *LAN, wireless*, dll yang digunakan berkualitas, 7.5% berpendapat bahwa komunikasi seperti *LAN, wireless*, dll yang digunakan sangat berkualitas dan sisanya 2.5% berpendapat bahwa komunikasi seperti *LAN, wireless*, dll yang digunakan kurang berkualitas.

Pertanyaan kedua mengenai tempat mengakses SIDJP, mayoritas responden atau sebanyak 40% berpendapat bahwa tempat mengakses SIDJP di seluruh Indonesia , 37.5% berpendapat bahwa tempat mengakses SIDJP di area KPP, 15% berpendapat bahwa tempat mengakses SIDJP hanya di seksi bersangkutan dan sisanya 7.5% berpendapat bahwa tempat mengakses SIDJP bisa dilakukan dengan cara *Online*.

Butir pertanyaan ketiga mengenai kecepatan akses data, mayoritas responden atau sebanyak 45% berpendapat bahwa kecepatan akses data berkisar 41-60 Kb/s, 22.5% berpendapat bahwa kecepatan akses data 21-40 Kb/s, 30% berpendapat bahwa kecepatan akses data 61-100kb/s dan sisanya atau sebanyak 2.5% menjawab 1-20Kb/s. Kategori cukup pada pertanyaan tentang kecepatan akses data/informasi melalui SIDJP membuktikan bahwa

kecepatan *online* belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut bisa jadi karena perbedaan kemampuan (bandwitch) pada jaringan yang terdapat pada masing-masing KPP sehingga kegiatan transfer data menjadi kurang baik.

Butir pertanyaan ke empat mengenai integrasi SIDJP ke seluruh Indonesia. Mayoritas responden atau sebanyak 70% berpendapat bahwa SIDJP kurang terintegrasi, 25% responden berpendapat bahwa SIDJP cukup terintegrasi ke seluruh Indonesia dan sisanya atau sebanyak 5% berpendapat bahwa SIDJP tidak terintegrasi ke seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa SIDJP ke seluruh Indonesia belum maksimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini bisa disebabkan oleh jaringan komunikasi di antar wilayah di Indonesia tidak sama baiknya.

Butir pertanyaan terakhir ialah masalah mengenai SIDJP yang terhubung dengan pihak ketiga (Bank). Mayoritas responden atau sebanyak 35% berpendapat bahwa SIDJP terhubung secara online cukup baik dengan pihak ketiga (bank), 32.5% berpendapat bahwa SIDJP terhubung secara online kurang baik dengan pihak ketiga (bank), 17.5% berpendapat bahwa SIDJP terhubung secara online dengan baik dengan pihak ketiga (bank), dan sisanya 15% berpendapat bahwa SIDJP terhubung online dengan masalah jaringan dengan pihak ketiga (bank). Hal ini membuktikan bahwa jaringan komunikasi dengan pihak ketiga masih kurang baik. Bila melihat fenomena yang ada bisa jadi kemampuan TI dari pihak ketiga yang tidak handal bisa dijadikan alasan mengapa terdapat masalah jaringan.

6. Database

Indikator database diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Database

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
26	Sistem Data Base dalam SIDJP	5	22	11	2	0	40	150	200
		12.5%	55.0%	27.5%	5.0%	0.0%	100.0%	75.0%	
27	Pengolahan data dalam SIDJP	16	6	12	2	4	40	148	200
		40.0%	15.0%	30.0%	5.0%	10.0%	100.0%	74.0%	
28	Sistem Data Base dalam SIDJP	19	4	9	8	0	40	154	200
		47.5%	10.0%	22.5%	20.0%	0.0%	100.0%	77.0%	
Total Skor								452	
Persentase Skor								75.33%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.22 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{452}{3x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{452}{600} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 75.33% atau dalam kategori baik. Ini dibuktikan dengan skor jawaban mengenai efisiensi dan konsistensi data yang ada di sistem database dalam SIDJP (75%), sistem pengolahan data dalam menghasilkan informasi (74%) dan penggunaan database dalam SIDJP (77%). Apabila dikaji lebih dalam mayoritas responden atau sebanyak 55% berpendapat bahwa sistem database yang ada dalam

SIDJP data cukup efisien dan konsisten, 27.5% berpendapat bahwa sistem database yang ada dalam SIDJP data tidak berlebihan tapi tidak konsisten, 12.5% berpendapat bahwa sistem database yang ada dalam SIDJP tidak ada data yang berlebihan dan ketidak konsistenan data dapat dihindari dan sisanya sebanyak 5% berpendapat bahwa sistem database yang ada dalam SIDJP terdapat data rangkap dan konsisten.

Kemudian dari segi pengolahan data dalam SIDJP mayoritas responden atau sebanyak 40% berpendapat bahwa pengolahan data dalam SIDJP untuk menghasilkan informasi dilakukan dengan cara *Online*, data langsung menjadi informasi saat input data, 30% berpendapat bahwa pengolahan data *Batch dan Online*, 15% berpendapat bahwa pengolan data *Online* data menjadi informasi pada waktu cut off yang ditentukan dan sisanya berpendapat bahwa pengolahan data dilakukan dengan cara *Batch* dan proses data yang sering mengalami gangguan (10%).

Lalu selanjutnya mayoritas responden atau sebanyak 47.5% berpendapat bahwa sistem database yang ada dalam SIDJP dapat dipakai bersama dengan adanya standarisasi (memudahkan membaca dan memasukkan data oleh pengguna), 10% berpendapat bahwa data ada dalam satu file dan digunakan untuk berbagai bagian, 22.5% berpendapat bahwa data dapat diakses secara bersamaan dan sisanya 20% berpendapat bahwa data sulit diakses secara bersamaan.

7. Data Warehouse

Indikator *data warehouse* diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai *Data Warehouse*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
29	Sistem *Data warehouse* (gudang data) dalam SIDJP	12	13	15	0	0	40	157	200
		30.0%	32.5%	37.5%	0.0%	0.0%	100.0%	78.5%	
30	Sistem *Data warehouse* (gudang data) dalam SIDJP	0	3	26	11	0	40	112	200
		0.0%	7.5%	65.0%	27.5%	0.0%	100.0%	56.0%	
Total Skor								269	
Persentase Skor								67.25%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.23 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{269}{2x5x40} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{269}{400} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 67.25\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 67.25% atau masuk dalam kategori cukup. Tanggapan mayoritas responden atau sebanyak 30% berpendapat bahwa sistem *data warehouse* sangat mensuport database yang logis, 32.5% berpendapat bahwa sistem data warehouse mendukung sistem database yang logis, dan mayoritas atau sebanyak 37.5% berpendapat bahwa sistem data warehouse cukup mendukung sistem database yang logis.

Dikaji dalam pertanyaan selanjutnya mengenai integrasi data *warehouse* mayoritas responden atau sebanyak 65% berpendapat bahwa sistem data warehouse cukup terintegrasi, 27.5% responden yang berpendapat bahwa Sistem *Data warehouse* (gudang data) dalam SIDJP kurang terintegrasi dan sisanya 7.5% berpendapat bahwa Sistem *Data warehouse* (gudang data) dalam SIDJP telah teintegrasi.

8. Data Mining

Indikator data mining diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Data Mining

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
31	*Data mining* (penggalian data) pada SIDJP dalam mencari hubungan antara record-record pada basis data	0	15	25	0	0	40	135	200
		0.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%	100.0%	67.5%	
32	*Data Mining* dalam SIDJP mampu menggolongkan record data yang berhubungan ke dalam segmen	0	16	24	0	0	40	136	200
		0.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	100.0%	68.0%	
33	*Data Mining* dalam SIDJP mampu mengintegrasikan data-data dari sistem lama ke sistem baru	0	5	33	2	0	40	123	200
		0.0%	12.5%	82.5%	5.0%	0.0%	100.0%	61.5%	
Total Skor								392	
Persentase Skor								65.67%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.24 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{394}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{394}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 65.67%, bila merujuk pada tabel 4.24 termasuk dalam kategori cukup. Ini dibuktikan dengan skor jawaban mengenai pertanyaan tentang penggalian data pada SIDJP dalam mencari hubungan antara record basis data sebesar 67.5%, mayoritas responden atau sebanyak 62,5% berpendapat bahwa penggalian data dalam SIDJP cukup baik dalam mencari record-record pada basis data, sedangkan sisanya 37,5% responden berpendapat bahwa penggalian data dalam SIDJP sudah baik dalam mencari hubungan antara record-record basis data.

Skor jawaban proses penggalian data pada SIDJP dalam menggolongkan record data yang berhubungan sebesar 68%, mayoritas responden atau sebanyak 60% berpendapat bahwa SIDJP dalam kaitannya menggolongkan data yang berhubungan ke dalam segmen dengan cukup baik sedangkan responden lainnya atau sebanyak 40% memberikan tanggapan bahwa SIDJP dalam kaitannya menggolongkan data yang berhubungan ke dalam segmen telah baik.

Skor jawaban mengenai SIDJP dalam mengintegrasikan dari sistem lama ke sistem baru sebesar 61.5%, mayoritas responden atau sebanyak

82.5% berpendapat bahwa proses penggalian data melalui SIDJP cukup baik dalam mengintegrasikan data-data dari sistem lama ke sistem baru, 12.5% berpendapat bahwa proses penggalian data melalui SIDJP sudah baik dalam mengintegrasikan data-data dari sistem lama ke sistem baru dan sisanya 5% responden beranggapan bahwa penggalian data melalui SIDJP kurang baik dalam mengintegrasikan data-data dari sistem lama ke sistem baru. Hal ini pun bisa disimpulkan bahwa migrasi data yang dilakukan dari sistem lama ke sistem baru belum baik.

9. OLAP *(Online Analytical Processing)*

Indikator OLAP (*Online Analytical Processing*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25
Distribusi Jawaban Responden Mengenai OLAP (*Online Analycal Processing*)

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
34	SIDJP	4	5	13	6	12	40	103	200
		10.0%	12.5%	32.5%	15.0%	30.0%	100.0%	51.5%	
35	Durasi waktu *analisis processing* dalam aplikasi SIDJP	0	6	25	9	0	40	117	200
		0.0%	15.0%	62.5%	22.5%	0.0%	100.0%	58.5%	
36	Kualitas output *analisis processing* sebagai pengambilan keputusan	0	8	29	3	0	40	125	200
		0.0%	20.0%	72.5%	7.5%	0.0%	100.0%	62.5%	
Total Skor								345	
Persentase Skor								57.50%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.25 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{3x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{600} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 57.50%, bila merujuk pada tabel 4.25 termasuk dalam kategori cukup. Skor jawaban tiap pertanyaan mengenai OLAP dalam SIDJP meliputi analisis SIDJP sebesar 51.5%. Mayoritas responden atau sebanyak 32.5% berpendapat bahwa SIDJP menginformasikan hasil proses SIDJP dalam bentuk laporan, 30% berpendapat bahwa SIDJP menghasilkan informasi masih perlu dianalisis sebelum digunakan, 15% berpendapat bahwa SIDJP informasi yang dihasilkan masih belum dapat dijadikan alat pengambil keputusan, 12.5% SIDJP mampu memberi informasi langsung guna pengambilan keputusan dan sisanya 10% berpendapat bahwa SIDJP otomatis membuat keputusan dari data yang diproses. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan belum tentu bisa dijadikan alat pengambil keputusan.

Bila dikaji lebih dalam mayoritas responden atau sebanyak 62.5% berpendapat bahwa durasi waktu analisis *processing* cukup baik, 22.5% berpendapat bahwa bahwa durasi waktu analisis *processing* kurang baik dan

sisanya sebanyak 15% berpendapat bahwa durasi waktu analisis *processing* sudah baik. Hal ini membuktikan bahwa durasi waktu dalam pengolahan analisis belum optimal. Hal ini dapat disebabkan masalah jaringan/*bandwith* yang digunakan di kantor pelayanan pajak di wilayah kota bandung.

Sedangkan skor jawaban untuk kualitas informasi yang dihasilkan dari proses analisis yang dilakukan SIDJP mayoritas jawaban responden atau sebanyak 72.5% berpendapat bahwa hasil informasi analisis prosesing yang ada cukup akurat, 20% berpendapat bahwa hasil informasi analisis prosesing yang ada sudah akurat dan sisanya 7.5% berpendapat bahwa hasil informasi analisis *prosesing* yang ada kurang akurat. Hal ini diperkuat dengan pertanyaan sebelumnya bahwa hasil informasi yang dihasilkan SIDJP kebanyakan masih perlu dianalisis sebelum dijadikan alat pengambil keputusan.

10. Manfaat *Business Intelligence System*

Indikator manfaat business intelligence system diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Manfaat *Business Intelligence System*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
37	Manfaat SIDJP menurut anda	9	15	16	0	0	40	153	200
		22.5%	37.5%	40.0%	0.0%	0.0%	100.0%	76.5%	
38	Manfaat SIDJP di kantor	11	11	18	0	0	40	153	200
		27.5%	27.5%	45.0%	0.0%	0.0%	100.0%	76.5%	
Total Skor								306	
Persentase Skor								76.5%	

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.26 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{306}{2x5x40} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{314}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76.50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 76.50%, bila merujuk pada tabel 4.26 termasuk dalam kategori baik. Pertanyaan mengenai manfaat SIDJP kaitannya dengan peningkatan kualitas informasi dapat dilihat dari mayoritas responden atau sebanyak 40% yang berpendapat bahwa SIDJP cukup meningkatkan kualitas informasi, 22.5% berpendapat bahwa SIDJP sangat meningkatkan kualitas informasi dan sisanya 37.5% berpendapat bahwa SIDJP dapat meningkatkan kualitas informasi. Bila dikaji, sebenarnya fungsi utama SIDJP telah terpenuhi yaitu meningkatkan kualitas informasi yang ada khususnya informasi perpajakan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai manfaat SIDJP kaitannya dengan peningkatan investasi teknologi informasi mempertegas manfaat SIDJP. Mayoritas responden atau sebanyak 45% berpendapat bahwa SIDJP cukup meningkatkan investasi teknologi informasi, dan 27.5% responden berpendapat bahwa SIDJP dapat meningkatkan investasi teknologi informasi dan sisanya 27.5% berpendapat bahwa SIDJP sangat meningkatkan investasi

teknologi informasi. Hal ini menunjukkan pula bahwa SIDJP dapat memperkaya investasi teknologi informasi yang ada khususnya di bidang perpajakan.

4.2.2 Metode Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Kualitas Data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Data variabel X (Kualitas Data) dan variabel Y (Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System*) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Sebelum diuji pengaruh kualitas data (X) terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* (Y) pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regresi. Diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan *software SPSS 14* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.27
Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.238	8.262		2.086	.044
	Kualitas_Data	1.515	.254	.696	5.968	.000

a. Dependent Variable: Implementasi_SIDJP_dgn_Pendekatan_BIS

Dari output *software SPSS 14* di atas diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 17{,}238 + 1{,}515X}$$

Nilai konstanta (a) memiliki arti bahwa ketika variabel kualitas data (X) bernilai nol atau Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* (Y) tidak dipengaruhi oleh kualitas data, maka rata-rata Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* bernilai 17,238. Sedangkan koefisien regresi (b) memiliki arti bahwa jika variabel kualitas data (X) meningkat sebesar satu satuan, maka Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* akan meningkat sebesar 1,515.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik kualitas data diduga akan meningkatkan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

Sebaliknya, semakin buruk kualitas data diduga akan menurunkan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

2. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara kualitas data dengan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, digunakan analisis korelasi.

Berikut ini adalah hasil pengolahan *software SPSS 14* untuk koefisien korelasi mengenai hubungan antara kualitas data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Tabel 4.28
Korelasi Antara Kualitas Basis Data dengan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System*

Correlations

		Implementasi_SIDJP_dgn_Pendekatan_BIS	Kualitas_Data
Pearson Correlation	Implementasi_SIDJP_dgn_Pendekatan_BIS	1.000	.696
	Kualitas_Data	.696	1.000
Sig. (1-tailed)	Implementasi_SIDJP_dgn_Pendekatan_BIS	.	.000
	Kualitas_Data	.000	.
N	Implementasi_SIDJP_dgn_Pendekatan_BIS	40	40
	Kualitas_Data	40	40

Berdasarkan hasil *output SPSS 14.0* di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel kualitas data dengan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,696. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang cukup tinggi/cukup kuat antara kualitas data dengan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas data akan membuat Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk kualitas data akan membuat Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* semakin menurun. Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari *output* (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya koefisien korelasi antara kualitas data dengan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung signifikan.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-*square*) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS 14 *for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.29
Analisis Korelasi Pearson

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696[a]	.484	.470	11.41569

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Data

Koefisien determinasi didapat sebesar 48,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data memberikan pengaruh sebesar 48,4% terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 51,6% Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dijelaskan diluar variabel kualitas data seperti visi dan perencanaan sistem yang jelas (*clear vision and planning*), dukungan komitmen manajemen (*committed management support*), bisnis berbasis metodologi dan manajemen proyek (*business-driven methodology and project management*), pemetaan solusi untuk kebutuhan pengguna (*mapping solutions to user*

requirements), kinerja pertimbangan sistem BI (*performance considerations of the Business Intelligence System*) (Naveen Vodapalli, 2009).

4.1.1 Uji Hipotesis

$H_0 : \rho = 0$ Artinya, tidak ada pengaruh kualitas data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

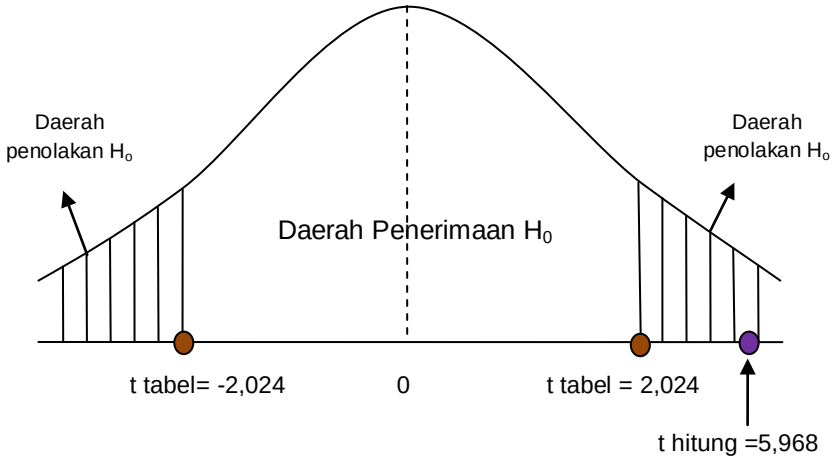
$H_a : \rho \neq 0$ Artinya, terdapat pengaruh kualitas data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Dengan $\alpha = 5\%$ dan dk = n-2 = 38 diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2,024.

Berdasarkan kriteria uji berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penolakan berarti H_a diterima, artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan berarti H_a ditolak, artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.

Gambar 4.3
Kurva Uji T



Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diperoleh nilai t hitung sebesar 5,968. Karena nilai t hitung (5,968) > t tabel (2,024), maka Ho ditolak. Artinya, terdapat pengaruh kualitas data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data mempunyai korelasi yang cukup tinggi/cukup kuat terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System*, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yaitu sebesar 0,696. Meskipun bukan satu satunya faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System*, tapi kualitas data adalah salah satu faktor yang cukup kuat dari beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business*

Intelligence System karena pengaruh yang diberikan oleh kualitas data yaitu 48,4% sehingga kualitas data merupakan faktor utama bila dibandingkan dengan faktor lain.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan *SPSS 14.0*, hasilnya adalah kualitas data mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System*. Hal tersebut diperkuat oleh teori Gorgan Vasile dan Oancea Mirela (2008) yang menyatakan bahwa:

> *"In order to make decisions that support the strategy of a business, the decision makers must confide in data they analyze. Business intelligence system projects improve with rich quality of data"*

Dapat disimpulkan harapan dari kualitas data yang semakin baik sehingga Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dengan pendekatan *Business Intelligence System* akan meningkat atau semakin baik, sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar data yang diterima dapat akurat, relevan, lengkap, tepat waktu, dapat dipercaya dan aksesibilitas.